



UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH VOKASI
DEPARTEMEN EKONOMIKA DAN BISNIS

Jl. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 | Telp: +(62) 274 513367
Fax: +(62) 274 549269 | diplomaekonomi@ugm.ac.id | www.diplomaekonomi.ugm.ac.id

21 Mei 2019

No : 381/UN1/SV.2/DEB/DN/2019
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Undangan Pelatihan

Yth. 1. Bapak/Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Bapak/Ibu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan hormat,
Seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan tuntutan organisasi dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD), salah satu hal paling penting adalah tahap penilaian aset. Dalam upaya mencapai nilai aset sesuai dengan kondisi aset saat akan dilaporkan dan daerah mengetahui berapa besar asetnya saat ini, maka melalui surat ini Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM mengundang Bapak/Ibu pimpinan untuk dapat menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dengan tema "Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016". Pelatihan diselenggarakan pada :

hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 27 s.d. 28 Juni 2019
waktu : 07.30 s.d. 16.00 WIB
tempat : Hotel di lingkungan UGM
biaya : Rp. 1.750.000/peserta
link pendaftaran : <http://ugm.id/PelatihanPengelolaanBMDBMN>

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan pelatihan bisa didapatkan dengan menghubungi *contact person* sebagai berikut: nomor telepon +62 274 513367 atau WA 082242908006 (Hatsita). Selain itu, informasi lebih lanjut juga bisa didapatkan melalui email: lah-akuntansi.sv@ugm.ac.id. Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat ikut serta dalam acara pelatihan mengingat pentingnya kegiatan tersebut. Atas kesediaan dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Ketua DEB SV UGM



Dra. Ike Yuli Andjani, M.Si.
NIP. 1965071619900302001

ToR (Term of Reference)
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016

Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah melaksanakan pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah.

Pemerintah daerah masih menganggap pengelolaan BMD secara fisik hanyalah sekedar instrumen pengelolaan daftar aset. Realita di lapangan menunjukkan banyak kasus yang sebenarnya dimulai dari salah kelola dan salah urus masalah aset, sehingga berdampak kerugian yang tidak sedikit. Sebagai contoh optimalisasi aset tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tidak teridentifikasi dengan jelas, sehingga sulit untuk mengetahui apakah aset tersebut sudah saatnya untuk diganti atau masih layak untuk di *maintenance*.

Jumlah pemerintah daerah yang terus bertambah atau dimekarkan ternyata tidak diikuti dengan peningkatan tata kelola aset-asetnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2015, jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 312 dari 514 Kabupaten/Kota. Status Kabupaten/Kota yang belum WTP rata-rata terkendala karena aset yang bermasalah.

Maka, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sangat penting untuk mewujudkan 3 T yakni tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum yang merupakan *strategic asset management* yang didalam pelaksanaannya mensinergikan antara fungsi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban, selanjutnya diharapkan akan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.

Materi

Materi dalam Pelatihan ini meliputi:

1. Tantangan dan Paradigma baru dalam pengelolaan BMD
2. Penggunaan dan pemanfaatan BMD,
3. Penilaian BMD
4. Pemindahtanganan BMD
5. *Benchmarking* : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Untuk melihat tingkat pemahaman peserta, di setiap topik akan diberikan contoh kasus dan pengerjaan penyelesaian kasus dengan tugas terstruktur sehingga peserta dapat mempraktekkan secara komprehensif proses pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pembicara

Dosen UGM dan Praktisi

Waktu dan Tempat

hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 27 s.d. 28 Juni 2019

waktu : 07.30 s.d. 16.00 WIB

tempat : Hotel di Lingkungan UGM

Investasi

Rp. 1.750.000 per peserta. Batas waktu pendaftaran Senin 24 Juni 2019. Kuota terbatas. Link pendaftaran: <http://ugm.id/PelatihanPengelolaanBMDBMN>

Fasilitas

Tas, Materi, Sertifikat, Luch 1 x, Coffee Break 2 X, dan Seminar Kit

Kontak

Departemen Ekonomika dan Bisnis SV UGM, Jl. Prof. Notonegoro, Bulaksumur, Yogyakarta,
 Kontak Person Via WA: Ibu Hatsita (082242908006) atau Bapak Kilus (08157950597)
 Kontak Person Via Telepon: (0274) 513367 Ext. 111, 127/ 08157950597/ Fax: (0274) 549289

Rundown Acara

HARI KAMIS		
Waktu	Materi	Narasumber
07.30-08.00	Registrasi Peserta	
08.00-08.15	Pembukaan	Dra. Ike Yuli Andjani, M.Si.
08.15-09.15	Tantangan dan Paradigma baru dalam pengelolaan BMD	Dr. R.Y. Kun Haribowo, M.Si.
09.15-09.30	<i>Coffee Break</i>	
09.30-10.30	Penggunaan BMD	Faiz Zamzami, SE., M.Acc., QIA.
10.30-11.30	Pemanfaatan BMD	Faiz Zamzami, SE., M.Acc., QIA.
11.30-12.30	Kasus Penggunaan BMD dan Pemanfaatan BMD	Faiz Zamzami, SE., M.Acc., QIA.
12.30-13.30	ISHOMA	
13.30-14.30	Pemindahtanganan BMD	Widodo, SE., M.Si.
14.30-15.30	Kasus Pemindahtanganan BMD	Widodo, SE., M.Si.
15.30-15.45	<i>Coffee Break</i>	
15.45-16.00	Penutup	
HARI JUMAT		
Waktu	Materi	Narasumber
07.30-08.00	Registrasi Peserta	
08.00-08.15	Pembukaan	
08.15-09.15	Penilaian BMD	Djasmanuddin, SE., M.Ec. Dev., MAPPI (Cert.)
09.15-09.30	<i>Coffee Break</i>	
09.30-10.30	Penilaian BMD	Djasmanuddin, SE., M.Ec. Dev., MAPPI (Cert.)
10.30-11.30	Kasus Penilaian BMD	Djasmanuddin, SE., M.Ec. Dev., MAPPI (Cert.)
11.30-13.00	ISHOMA	
13.00-15.00	<i>Benchmarking</i> Pengelolaan BMD ke BPKAD Sleman	Widodo, SE., M.Si.

Lampiran

No	BKD/BKAD	No	BKD/BKAD
1	Provinsi Aceh	275	Kabupaten Jember
2	Provinsi Sumatera Utara	276	Kabupaten Jombang
3	Provinsi Sumatera Barat	277	Kabupaten Kediri
4	Provinsi Riau	278	Kabupaten Lamongan
5	Provinsi Kepulauan Riau	279	Kabupaten Lumajang
6	Provinsi Jambi	280	Kabupaten Madiun
7	Provinsi Bengkulu	281	Kabupaten Magetan
8	Provinsi Sumatera Selatan	282	Kabupaten Malang
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	283	Kabupaten Mojokerto
10	Provinsi Lampung	284	Kabupaten Nganjuk
11	Provinsi Banten	285	Kabupaten Ngawi
12	Provinsi Jawa Barat	286	Kabupaten Pacitan
13	Provinsi DKI Jakarta	287	Kabupaten Pamekasan
14	Provinsi Jawa Tengah	288	Kabupaten Pasuruan
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	289	Kabupaten Ponorogo
16	Provinsi Jawa Timur	290	Kabupaten Probolinggo
17	Provinsi Bali	291	Kabupaten Sampang
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	292	Kabupaten Sidoarjo
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	293	Kabupaten Situbondo
20	Provinsi Kalimantan Barat	294	Kabupaten Sumenep
21	Provinsi Kalimantan Selatan	295	Kabupaten Trenggalek
22	Provinsi Kalimantan Tengah	296	Kabupaten Tuban
23	Provinsi Kalimantan Timur	297	Kabupaten Tulungagung
24	Provinsi Kalimantan Utara	298	Kota Batu
25	Provinsi Gorontalo	299	Kota Blitar
26	Provinsi Sulawesi Selatan	300	Kota Kediri
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	301	Kota Madiun
28	Provinsi Sulawesi Tengah	302	Kota Malang
29	Provinsi Sulawesi Utara	303	Kota Mojokerto
30	Provinsi Sulawesi Barat	304	Kota Pasuruan
31	Provinsi Maluku	305	Kota Probolinggo
32	Provinsi Maluku Utara	306	Kota Surabaya
33	Provinsi Papua	307	Kabupaten Badung
34	Provinsi Papua Barat	308	Kabupaten Bangli
35	Kabupaten Aceh Barat	309	Kabupaten Buleleng
36	Kabupaten Aceh Barat Daya	310	Kabupaten Gianyar
37	Kabupaten Aceh Besar	311	Kabupaten Jembrana
38	Kabupaten Aceh Jaya	312	Kabupaten Karangasem
39	Kabupaten Aceh Selatan	313	Kabupaten Klungkung
40	Kabupaten Aceh Singkil	314	Kabupaten Tabanan